

## PERAN EFEK KOMUNIKASI POLITIK DALAM KEKISRUHAN DI PARTAI DEMOKRAT

Herdiansyah Amanu<sup>1</sup>, Lovia Evanne<sup>2</sup>

herdiansyah@uss.ac.id

loviaevanne@uss.ac.id

### ABSTRACT

*The development of mass media in Indonesia has experienced tremendous growth. Especially after entering the reformation era, the tap of democracy in Indonesia has begun to open. This turned out to have a tremendous impact on press freedom. The press is no longer confined by the rules of the authorities, so that the press can be used by various parties to defend the interests of the institutions that own it, including for political interests. The trend that is currently seen is that social-political organizations in Indonesia are starting to compete to dominate media companies in order to improve their image in the eyes of the public. The political elites try to build political communication intensely in order to attract the sympathy of the masses to side with them. The media is so sought after by many parties because of its power in shaping public opinion.*

**Keywords:** *mass media, press freedom, political communication, public opinion*

---

### ABSTRAK

*Efek komunikasi politik terkadang akan membuahkan hasil, tapi juga bisa tidak gagal menghasilkan perubahan sosial. Komunikasi politik yang menjadi perhatian publik serta mendapat sorotan media dalam porsi yang besar dan terus menerus dapat saja menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Setidaknya, kondisi ini dapat mengguncang kedudukan penguasa sehingga isu-isu yang dihembuskan oleh para oposisi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Jika tidak, efek komunikasi politik ini akan menggelinding membentuk bola salju yang bisa saja menggoyahkan kursi kekuasaan, bila sang penguasa abai. Seperti yang terjadi di Partai Demokrat sebagai partai penguasa, yang harus memperbaiki komunikasi politiknya guna memperkuat kembali eksistensi partai dengan segera melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi kedalam demi soliditas partai. Pertikaian diantara pihak-pihak internal partai harus segera dihetikan dan diselesaikan. Lebih jauh lagi agar pihak-pihak yang berurusan dengan masalah hukum harus berani jujur mengakui kesalahannya, mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan secara legowo siap menerima sanksi apapun demi membersihkan nama partai.*

**Kata kunci:** *efek komunikasi, partai, penguasa, rekonsiliasi, penguasa.*

---

<sup>1</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Selatan, Palembang

## 1. Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan semua penyampaian proses informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga. Pandangan demikian membersitkan beberapa hal penting: komunikasi politik menandai keberadaan dan aktualisasi lembaga-lembaga politik, merupakan fungsi dari sistem politik dan berlangsung dalam suatu sistem politik tertentu (McQuail, 1992:472-473).

Dalam situasi normal, komunikasi politik berproses dalam suatu sistem politik yang mapan. Pertukaran pesan yang terjadi diantara para aktor atau partisipan akan direspon oleh pihak-pihak yang terkait, atau setidaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Pawito, 2009:12). Disinilah pengaruh atau efek itu terlihat, dimana masing-masing pihak mengupayakan pengaruhnya agar pihak lain mau menerima pengaruh tersebut sesuai dengan kehendaknya. Para pengusaha yang menginginkan upah buruh yang murah, maka mereka berusaha

mempengaruhi pihak-pihak yang berwenang yakni pemerintah dan DPR agar menghasilkan undang-undang yang bisa melindungi kepentingan mereka, dengan melakukan pendekatan atau lobi-lobi politik.

Efek komunikasi politik terkadang akan membuahkan hasil, tapi juga bisa tidak gagal menghasilkan perubahan sosial. Sebagai contoh, komunikasi politik yang diwujudkan lewat suatu demonstrasi yang mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, di-*blow up* secara besar-besaran oleh media serta didukung oleh opini masyarakat internasional, dapat menghasilkan suatu perubahan. Lihat saja demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada zaman orde lama yang didukung oleh segenap komponen masyarakat serta TNI saat itu, ternyata berhasil menumbangkan rezim Presiden Soekarno pada tahun 1966. Hal ini kemudian terjadi kembali pada masa Orde Baru, dimana mahasiswa kembali mampu menumbangkan sebuah rezim, yaitu rezim Presiden Soeharto tahun 1998.

Namun terkadang efek komunikasi politik terkadang juga tidak menghasilkan

perubahan. Sebagai contoh demonstrasi mahasiswa yang terjadi dimana-mana saat menentang kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM pada tahun 2006 dan 2008. Namun akhirnya pemerintah tetap saja menaikkan harga BBM. Kondisi ini menunjukkan gagalnya efek komunikasi politik dalam menghasilkan perubahan sosial.

Ada beberapa efek atau akibat yang dapat ditimbulkan oleh komunikasi politik menurut Nimmo (1989;176-180):

Pertama, akibat kognitif: berita politik menyajikan informasi yang dibutuhkan orang ketika dihadapkan dalam situasi yang ambigu.

Kedua, akibat afektif: komunikasi politik lebih cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang dalam nilai politik mereka.

Ketiga, akibat partisipasi: keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik, di lain pihak komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik.

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian atau riset pustaka. Riset pustaka hanya merujuk pada sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitiannya. Karena itu riset ini membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2004:1-2).

Dalam artikel ini dikemukakan berbagai teori yang diperoleh dari perpustakaan, kemudian mengkonfrontirkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan merujuk pada berbagai pemberitaan di media, lalu menganalisis topik yang dibahas.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Hasil penelitian**

Setelah memenangkan pemilu 2009 dan menjadi *the ruling party* di republik ini, Partai Demokrat tidak henti-hentinya dihantam berbagai cobaan yang mengguncang partai ini. Sebut saja kasus suap wisma atlet yang telah menyebabkan kekisruhan di Partai Demokrat belakangan ini. Kasus ini telah menyeret beberapa nama kader-kadernya seperti M. Nazaruddin (Mantan Bendahara Umum) yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam dan Angelina Sondakh yang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan Mirwan Amir (Wakil Ketua

Badan Anggaran DPR), Andi Mallarangeng (Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat) serta Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) ikut dicurigai terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus suap wisma atlet ini ternyata telah memecahbelah Partai Demokrat. Ini terlihat bagaimana perilaku komunikasi politik para petingginya terutama dalam berkomentar di media massa yang telah menunjukkan perpecahan di tubuh partai, pernyataan-pernyataan yang tidak sinkron antara satu sama lain, bahkan saling menyudutkan, saling lempar tanggungjawab dan saling mementingkan diri sendiri. Gap antara kubu-kubu yang dulunya saling bersaing untuk memperoleh pengaruh dan puncak kekuasaan di tubuh partai, kini mulai terkuak dengan semakin santernya kasus suap ini. Kubu Anas, kubu Andi dan kubu Marzuki Alie mulai berupaya cari selamat guna mempertahankan eksistensinya di tubuh partai. Banyak pihak di internal partai menginginkan Anas untuk mundur dari jabatan Ketua Umum partai sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus suap wisma atlet, namun Anas tidak bergeming dan tetap bersikukuh di jabatan puncak. Anas selalu berusaha menepis dugaan tersebut. Karut marut komunikasi

politik yang ada di tubuh Partai Demokrat telah menimbulkan efek yang merugikan partai itu sendiri, setidaknya telah memecahbelah partai sehingga kekompakan dan kesolidan partai menjadi terancam.

### **3.2 Pembahasan**

Sementara seperti yang diberitakan oleh [republika.co.id](http://republika.co.id) (9/7/2011), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menurut pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, berupaya memanfaatkan kisruh Partai Demokrat untuk mendongkel kepemimpinan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum. Burhanuddin mengatakan hal itu menanggapi adanya layanan pesan singkat (SMS) dari Marzuki Alie kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang beredar di kalangan wartawan. SMS dari Marzuki Alie tersebut isinya melaporkan, bahwa dirinya mendapat banyak SMS dari elite Partai Demokrat yang saling memojokkan. Dalam SMS tersebut, Marzuki juga menjelaskan bahwa manajemen Partai Demokrat sudah tak efektif lagi. Apa pun perintah pimpinan

Partai Demokrat sudah tidak dipatuhi lagi oleh elite Partai Demokrat.

Partai ini tidak hanya dilanda konflik internal, tetapi juga menjadi bulan-bulanan dari pihak eksternal partai seperti lawan-lawan politik mereka bahkan media massa turut memberi efek dalam memperburuk citra Partai Demokrat lewat pemberitaannya.

Isu Marzuki berupaya mendongkel kepemimpinan Anas menunjukkan betapa mudahnya terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain. Adanya dukungan dari pihak-pihak yang menginginkan Anas untuk mundur dari kursi Ketua Umum, seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mencerminkan kesetiaan kepada kelompok melebihi kesetiaan kepada organisasi. Loyalitas kepada pimpinan organisasi disini patut dipertanyakan. Kesaksian Angelina Sondakh di persidangan yang dianggap banyak berbohong untuk menutupi fakta yang sebenarnya serta kesaksian Nazaruddin yang berusaha menyeret nama-nama petinggi Partai Demolrat

lainnya dalam kasus suap wisma atlet, menggambarkan betapa anggota organisasi tidak segan-segan mengorbankan kepentingan organisasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan diri sendiri.

Upaya untuk memperbaiki citra partai di mata rakyat berupaya dilakukan oleh para petinggi Partai Demokrat, diantaranya dengan berupaya merombak kepengurusan partai, termasuk isu melakukan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan partai terutama bagi persiapan dalam menghadapi Pemilu 2014. Namun karena begitu derasnya pertarungan kepentingan diantara kelompok-kelompok yang bertikai di dalam tubuh internal partai, ditambah lagi persoalan hukum yang banyak melibatkan elite partai yang juga tak kunjung selesai, membuat kekisruhan di Partai Demokrat ini terus berlanjut. Ini semakin membuat citra partai Demokrat menjadi semakin terpuruk.

Partai Demokrat harus memperbaiki komunikasi politiknya guna memperkokoh kembali eksistensi partai dengan segera

melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi kedalam demi soliditas partai. Pertikaian diantara pihak-pihak internal partai harus segera dihentikan dan diselesaikan. Lebih jauh lagi agar pihak-pihak yang berurusan dengan masalah hukum harus berani jujur mengakui kesalahannya, mengungkapkan fakta yang sebenarnya dan secara legowo siap menerima sanksi apapun demi membersihkan nama partai. Semua pihak harus berani mengambil tanggungjawab. Namun apakah kader-kader demokrat siap melakukan itu? Selama langkah-langkah tersebut enggan dilakukan, maka selama itu pula kisruh di Partai Demokrat akan terus berkecamuk dan partai ini cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh rakyat yang sudah jenuh dengan pertikaian politik. Satu lagi kebijakan yang tidak populer yang dikeluarkan pemerintah saat ini yang sedang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menaikkan harga BBM ditengah sulitnya perekonomian rakyat. Ini tentu akan semakin membuat rakyat terluka dan boleh jadi rakyat ramai-ramai akan meninggalkan Partai Demokrat di periode Pemilu 2014 mendatang.

## **Penutup**

Demikianlah bagaimana efek komunikasi politik bekerja. Efek komunikasi politik terkadang akan membuahkan hasil, tapi juga bisa tidak gagal menghasilkan perubahan sosial. Komunikasi politik yang menjadi perhatian publik serta mendapat sorotan media dalam porsi yang besar dan terus menerus dapat saja menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Setidaknya, kondisi ini dapat mengguncang kedudukan penguasa sehingga isu-isu yang dihembuskan oleh para oposisi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Jika tidak, efek komunikasi politik ini akan menggelinding membentuk bola salju yang bisa saja menggoyahkan kursi kekuasaan, bila sang penguasa abai.

## **Daftar Pustaka**

- McQuail, Denis. 1992. Political Communication. Routledge.
- Nimmo, Dan. 2004. Komunikasi Politik, Komunikator, Khalayak dan Efek. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pawito. 2009. Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan, Jalsutra.

Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian  
Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka  
Obor Indonesia.

**Rujukan Elektronik**

*<http://republika.co.id> (9/7/2011).*